

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepadatan penduduk yang setiap tahunnya meningkat yang berada pada wilayah perkotaan akan dapat mempengaruhi kualitas keadaan kota tersebut. Dampak dari kepadatan penduduk yaitu dapat menyebabkan meningkatnya hasil limbah, hal tersebut jika tidak dikelola dengan baik maka dapat menyebabkan keadaan lingkungan di kawasan tersebut jadi kurang baik. Dalam masalah tersebut muncul sebuah inisiatif dari sebuah kelompok masyarakat di wilayah perkotaan untuk memperbaiki lingkungan kualitas lingkungan, adapun gerakan yang bisa dimulai dari memperbaiki gaya hidup, penghijauan kampung, penghematan penggunaan air, pemilahan sampah, dll.

Tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah perkotaan mengalami peningkatan yang cukup pesat. Khususnya pada Kota Yogyakarta yang mengalami peningkatan pada jumlah penduduknya, dilihat dari data Badan Pusat Statistik DIY menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan sebesar 427.498 – 435 936 jiwa.

Meningkatnya pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh proses urbanisasi dan industrialisasi, dipicu tersedianya infrastruktur yang lebih baik dibandingkan di pedesaan. Karena pertumbuhan

industri lebih banyak di perkotaan. Oleh sebab itu sebagian besar perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan untuk memperoleh pekerjaan yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya pertumbuhan penduduk perkotaan yang cepat.

Masalah yang ditimbulkan oleh kepadatan penduduk juga menimbulkan masalah lain yaitu alih fungsi lahan. Sudah semakin banyak lahan yang mengalami alih fungsi lahan, pembangunan infrastruktur di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menyebabkan dampak ke lahan pertanian sekitar 400(ha) lahan pertanian hilang pertahun dan saat ini yang tersisa di lahan pertanian wilayah saat ini tinggal 104 ha.¹

Pada tahun 2018 untuk luas lahan sawah yang berada pada Kota Yogyakarta seluas 55 ha, selain itu untuk luas lahan non sawah yang berada pada Kota Yogyakarta seluas 3195 ha jumlah angka tersebut di peroleh dari seluruh kecamatan yang berada pada Kota Yogyakarta. Pada tahun 2019 luas lahan sawah yang berada di Kota Yogyakarta seluas 54 ha, selain itu untuk luas lahan non sawah yang berada di Kota Yogyakarta seluas 3196 ha(BPS-Statistics of Yogyakarta Municipality, 2021).

Menurut Imran pengaruh perkembangan kota yang begitu rumit menimbulkan berbagai permasalahan kota antara lain, penggunaan tata ruang seperti *zoning* alokasi lahan yang tidak teratur, tidak optimalnya penggunaan tanah,

¹ <https://mediaindonesia.com/nusantara/342373/di-yogyakarta-waspadai-laju-alih-fungsi-lahan> (diakses pada 5 September 2020, pukul 05:10 WIB)

timbulnya berbagai masalah lalu lintas, tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat utilitas dan fasilitas, munculnya masalah pencemaran lingkungan. Kerusakan ini disebabkan oleh manusia yang tidak lagi mengelola alamnya secara baik untuk memenuhi kebutuhannya, namun hanya untuk memenuhi keinginannya.(Mukti & Efendi, 2020)

Di sisi lain, meningkatnya perkembangan industrilisasi di Kota Yogyakarta dapat menimbulkan dampak negatif seperti peningkatan jumlah limbah sampah baik berasal dari individu, industri rumah tangga, maupun tempat keramaian lainnya yang berpotensi menimbulkan sampah buangan yang menjadi sumber pencemaran lingkungan (Mukti & Efendi, 2020).

Tantangan dalam ketahanan pangan di era saat ini tidak hanya pemanfaatan lahan, namun juga adanya pandemi Covid-19. Pandemi ini bukan hanya berdampak bagi kesehatan, tetapi juga berdampak pada hampir seluruh sektor dalam sistem kehidupan masyarakat. Salah satu sektor strategis yang paling terdampak adalah ketahanan pangan yang berperan penting bagi kehidupan masyarakat. Hal ini semakin memperburuk keadaan dengan adanya pandemi Covid-19, banyak sekali dari kalangan manusia yang terkena dampak dari pandemi yang menyebabkan hilangnya pekerjaan dan berbagai macam kerugian. Salah satunya yaitu dalam hal ketahanan pangan, ketahanan pangan sendiri merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi apalagi dalam keadaan pandemic seperti sekarang ini.

Pemanfaatan lahan kosong merupakan sebuah keadaan yang sangat dibutuhkan untuk saat ini di wilayah perkotaan, dikarenakan sudah hampir setiap lahan kosong di wilayah perkotaan sudah menjadi bangunan-bangunan yang sudah mengurangi ketersediaan lahan kosong di wilayah tersebut. Keadaan tersebut juga dapat menyebabkan meningkatnya polusi di wilayah perkotaan dan juga meresahkan warga yang bertempat tinggal di permukiman yang sudah banyak sekali berdirinya gedung atau hotel. Hal tersebut juga dapat mempengaruhi kelestarian lingkungan yang seharusnya bisa dimanfaatkan dengan adanya kegiatan memanfaatkan lahan kosong tersebut dengan melakukan menanam sayur mayur atau dengan pembibitan sayuran.

Semakin berkurangnya pemanfaatan lahan kosong maka akan dapat mempengaruhi kualitas lingkungan, adanya lahan kosong ialah untuk dimanfaatkan dengan adanya kegiatan masyarakat agar masyarakat tidak hanya diam di rumah saja. Sementara jumlah penduduk yang terus bertambah, kawasan tersebut dibatasi sehingga menyebabkan masalah penduduk dalam pemanfaatan sumber daya lahan di wilayah perkotaan. Keadaan ini mengarah pada perubahan tata guna lahan yang disebabkan oleh faktor manusia atau faktor alam yang menjadi penyebab terjadinya dinamika penggunaan lahan. Bentuk penggunaan lahan dinamis yang paling sering terjadi adalah penggunaan lahan yang tidak digunakan atau lahan kosong dan perubahan penggunaan lahan dari satu fungsi ke fungsi lainnya.

Awal mula terciptanya lumbung mataram dan gerakan yang beridiri bersamaan dengan lumbung mataram adalah di kota itu pertanian tidak bisa hanya berbasis dengan produksi tetapi konsep pertanian untuk wisata juga harus di terapkan di wilayah perkotaan. Lumbung mataram merupakan wujud dari konsep tersebut yang mana lahan di wilayah perkotaan semakin sempit maka dari itu pemerintah perlu memaduka konsep pertanian dengan wisata.

Ada beberapa kelompok tani yang berada pada Kota Yogyakarta berjumlah 156 kelompok tani dan jumlah kampung sayur 111, tersebar di berbagai macam kecamatan yang berada pada kota Yogyakarta, daftarnya sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Daftar Kelompok Tani di Kota Yogyakarta

No	Kecamatan	Jumlah Kelompok Tani
1	Gedongtengen	11
2	Jetis	9
3	Umbulharjo	12
4	Kotagede	20
5	Tegalrejo	18
6	Kraton	6
7	Wirobrajan	6
8	Gondokusuman	14

9	Danurejan	20
10	Ngampilan	13
11	Mantrijeron	4
12	Mergangsan	10
13	Pakualaman	4
14	Gondomanan	9
Total		156

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Untuk kali ini, saya mengambil contoh dari tempat yang menurut saya cukup berhasil dalam menjalankan pemanfaatan lahan kosong dalam hal *urban farming*, yaitu Kelompok Tani Ngudimulyo, Purbaasri, dan Markisa. Hal ini berawal dari solidaritas warga kampung pugeran yang berinisiatif untuk memanfaatkan lahan kosong menjadi lahan pertanian, awal mulanya lahan tersebut merupakan tempat pembuangan sampah yang sangat mengganggu lingkungan kampung, adanya hal itu warga dan pemerintah kota bekerjasama untuk membersihkan tumpukan-tumpukan sampah sehingga menjadi lahan pertanian produktif. Adapun cirikhas atau karakteristik yang dimiliki oleh beberapa kelompok tani, pada kelompok tani ngudimulyo memiliki karakteristik yaitu memiliki rumah pembibitan dan rumah magot. Tujuan dari solidaritas warga untuk membentuk

lahan pertanian produktif adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan selama pandemi Covid-19.

Dahulu awal terbentuknya kelompok tani purbaasri, berawal dari masyarakat yang prihatin terhadap lokasi tersebut karena pada awalnya tempat itu hanya merupakan tempat yang tidak terurus, penuh dengan tumbuhan-tumbuhan liar, dan juga “sumber penyakit”. Kemudian, masyarakat memiliki inisiatif untuk mengubah keadaan lokasi agar menjadi lebih baik dengan dijadikannya lahan pertanian produktif. Masyarakat melakukan kegiatan tersebut didampingi oleh lembaga dan para ahli dalam bidang pemanfaatan lahan kosong. Adapun ciri khas atau karakteristik yang dimiliki oleh beberapa kelompok tani, pada kelompok tani purbaasri memiliki ciri khas beberapa kolam lele pada lahan pertaniannya sehingga dijadikan ternak lele. Tujuan dari kegiatan yang diawali dari inisiatif masyarakat tersebut diharapkan dapat mencukupi kebutuhan pangan selama pandemi.

Pada awal mula terbentuknya kelompok tani markisa, berasal dari keprihatinan warga pada sebuah lingkungan yang sangat tidak terawat. Lingkungan tersebut awalnya hanya sebuah tempat yang tidak terawat, banyak tumbuhan liar, dan juga tempat pembuangan sampah, kemudian masyarakat berdiskusi dan memiliki inisiatif untuk mengubah keadaan lingkungan tersebut. Hasil dari diskusi tersebut membuahkan hasil yaitu tempatnya tersebut akan dijadikan tempat kampung wisata, namun dengan berjalannya waktu pandemi mulai melanda masyarakat pun

mengubah yang awalnya tempat wisata menjadi lahan pertanian produktif. Adapun ciri khas atau karakteristik yang dimiliki oleh beberapa kelompok tani, pada kelompok tani markisa memiliki karakteristik yaitu pengelolaan sampah yang dijadikan pupuk, tujuan perubahan hal tersebut agar dari hasil pertanian produktif dapat mencukupi kebutuhan pangan masyarakat selama pandemi.

Kelompok Tani Ngudimulyo, Purbaasri, dan Markisa sudah menjalin kerjasama dengan Dinas Pertanian Kota Yogyakarta dan Dinas Pertanian Provinsi DIY dalam pengembangan kebun, selain itu ketiga kelompok tani tersebut juga menerima program dari pemerintah Kota Yogyakarta yang bernama lumbung mataraman, lumbung mataraman adalah upaya ketahanan pangan di masa pandemi Covid-19 yang dibiayai dengan anggaran Dana Keistimewaan DIY. Lumbung mataraman bukanlah bangunan fisik tetapi lumbung pangan hidup yang berbasis dari rumah tangga dan dalam berkembangnya waktu diharapkan dapat menjadi lumbung desa yang dapat mendukung ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan di wilayah.

Lumbung Mataraman yang dilaksanakan melalui anggaran Dana Keistimewaan untuk menghidupkan kembali tradisi pertanian di Yogyakarta yaitu memanfaatkan lahan pekarangan rumah tangga untuk menyediakan kebutuhan pangan dengan prinsip: kemandirian pangan, diversifikasi pangan berbasis sumber pangan lokal, pelestarian sumber daya genetik pangan, dan kebun bibit. Total

alokasi danais untuk Lumbung Pangan Mataram yang baru pertama kalinya dikelola Dispertan Kota Yogya mencapai sekitar Rp 600 juta. Bentuk kegiatannya lebih bersifat pembinaan wilayah hingga mampu memproduksi hasil pangan secara mandiri.²

Adanya program lumbung mataraman yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta merupakan salah satu bentuk usaha sederhana untuk mengembalikan keguyuban dan solidaritas masyarakat yang sempat menurun akibat pandemic Covid-19. Kembalinya keguyuban dan solidaritas masyarakat pada saat pandemic sekarang ini suatu yang wajib disyukuri, karena program yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta bukan hanya berdampak pada ketahanan pangan tapi juga pada perbaikan budaya. Selain itu konsep dari lumbung mataram ini juga memadukan antara wisata dan pertanian di tengah kota dengan lahan yang terlalu luas namun cukup untuk digunakan dan dikelola sebagai lahan pertanian Maka dari itu peneliti sangat tertarik untuk meneliti bagaimana “Gerakan Pemanfaatan Lahan Sebagai upaya Pemberdayaan Masyarakat Untuk Ketahanan Pangan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Yogyakarta”.

² <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/lumbung-pangan-mataram-dispertan-kota-yogya-bina-3-wilayah/> (diakses pada tanggal 20 Oktober 2020)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh peneliti di atas, pertanyaan yang dijawab melalui penelitian ini adalah:

Bagaimana pemberdayaan masyarakat di dalam membangun kemandirian pangan di Kota Yogyakarta dalam perspektif *collaborative governance*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang *collaborative governance* dalam mengelola lahan kosong sekaligus untuk mengajak masyarakat dalam penerapan *urban farming*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah agar dapat memahami permasalahan yang terjadi di sebuah lingkungan perkotaan dan dibagi, secara teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini yaitu dapat memberikan informasi tentang strategi pengembangan ruang terbuka hijau privat dan pemberdayaan SDM melalui *urban farming* tersebut. Selanjutnya penelitian ini dapat menjelaskan atas keraguan-keraguan teori yang bermunculan terhadap program tersebut.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana menjaga lingkungan dalam memanfaatkan lahan kosong akan dapat mengajak masyarakat serta berbagi informasi yang terbaru mengenai sudut pandang masyarakat terhadap program tersebut. Dapat menambah wawasan tentang pemberdayaan SDM dan pengembangan lingkungan sekitar, selain itu dapat membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan kurangnya lahan kosong yang berada pada wilayah perkotaan.

E. Literature Review

Penelitian ini menggunakan beberapa literatur review yang bersumber dari artikel jurnal yang berbeda-beda yang tentunya berkaitan dengan judul yang diambil peneliti. Tujuan dari analisis kajian pustaka atau literature review ini adalah memperoleh persamaan dari penelitian yang akan diteliti dan juga untuk menggali informasi guna mendapatkan perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya sehingga didapat kebaharuan dalam penelitian ini.

Penelitian yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Anissya Noer di jurnal yang berjudul “Implementasi Program Urban Farming Pada Kelompok Sumber Trisno Alami di Kecamatan Bulak Kota Surabaya”. Dalam jurnal tersebut membahas tentang, Program urban farming merupakan salah satu

wujud dari upaya pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan mereka dibidang pangan. Program ini juga meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan keluarga serta memotivasi keluarga miskin untuk membentuk suatu kelompok pertanian guna untuk membangun dirinya sendiri agar lebih mandiri dan maju di Kota Surabaya (Wijayanti, 2013).

Adapun saran terkait dengan pelaksanaan program urban farming ini, pihak Dinas Pertanian harus lebih giat dalam memotivasi warga miskin agar mau melaksanakan program urban farming ini. Serta dalam pelaksanaan program urban farming ini juga harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan terkait dengan pemberian bantuan kepada target sasaran yang telah ditentukan.

Penelitian yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rifqi di jurnal yang berjudul “Pertanian Perkotaan: Urgensi, Peranan, Dan Praktik Terbaik”. Dalam jurnal tersebut membahas tentang, Keberadaan pertanian dalam masyarakat perkotaan dapat dijadikan sarana untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan sumberdaya alam yang ada di kota dengan menggunakan teknologi. Masyarakat kota yang umumnya sibuk karena bekerja, pertanian perkotaan dapat menjadi media untuk memanfaatkan waktu luang (Fauzi et al., 2016).

Penelitian yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Yuliana di jurnal yang berjudul “Sistem Integrasi Padi Ternak Untuk

Mewujudkan Kedaulatan Pangan”. Dalam jurnal tersebut membahas tentang, Kedaulatan pangan membalikkan konsep modernisasi menjadi hal-hal yang bersifat *back to basic* atau *back to nature* dengan memprioritaskan produksi untuk pemenuhan dan keberlanjutan pangan lokal dan pasar lokal melalui pengadaan input-input produksi pertanian yang memanfaatkan kearifan setempat dan ramah lingkungan (Yuliana, 2014).

Penelitian yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Fitriani di jurnal yang berjudul “STRATEGI MENGHADAPI ANCAMAN KELANGKAAN PANGAN NASIONAL DI MASA PANDEMI”. Dalam jurnal tersebut membahas tentang, Empat kendala yang dialami petani selama masa pandemi antara lain modal yang terbatas, kebutaan terhadap teknologi, kesulitan proses pendistribusian, dan harga produk yang tidak stabil. Hal ini dikarenakan pengaruh ketahanan pangan yang sangat krusial dalam pembentukan kondisi ekonomi yang kondusif, Menurut organisasi pangan dunia atau Food and Agriculture Organization (FAO), ketahanan pangan lebih banyak ditentukan oleh kondisi sosial dan ekonomi dari pada keadaan pertanian serta produksi bahan pangan (Fitriani, 2020).

Ketahanan pangan nasional tidak hanya berfokus pada ketersediaan sumber pangan bagi masyarakat, melainkan juga berfokus pada bagaimana bahan-bahan pangan didapatkan, Strategi-strategi yang disusun pada penelitian ini dapat

dilakukan oleh seluruh pihak, baik oleh pemerintah, masyarakat, dan stakeholder terkait dalam rangka menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional, Sedangkan kendala yang memerlukan tindak lanjut antara lain keterbatasan lahan, modal yang kurang, kebutaan terhadap teknologi, kesulitan distribusi produk, dan harga produk yang tidak stabil.

Penelitian yang selanjutnya yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Priyandoko di jurnal yang berjudul “Berkebun Di Pekarangan Rumah Sebagai Upaya Ketahanan Pangan Di Masa Pandemi Warga Kampung Herbal Sukolelo, Pandaan, Kabupaten Pasuruan”. Dalam jurnal tersebut membahas tentang, Pendekatan yang dilakukan memberikan tawaran untuk dilakukan menanam sayur-sayuran di sekitar pekarangan rumah warga, Kampung Herbal Sukolelo atau KHS ini mempunyai potensi yang baik untuk berkebun tanaman herbal sebagai kegiatan yang baik untuk mengatasi masalah pangan di masa pandemi ini, Dalam metode pembibitan dan penanaman dilakukan metode tray untuk jenis tanaman sawi, tomat, kunyit putih , dan lengkuas (Priyandoko et al., 2020).

Kegiatan yang telah dilakukan di Kampung Herbal Sukolelo ini bertujuan untuk mengajak warga setempat meningkatkan produktifitas, khususnya dalam bidang pertanian dan budidaya tanaman herbal yang bermanfaat ekonomis dan berdaya guna selama masa pandemi. Tanaman herbal yang dijadikan bibit tanaman

dan dibagikan pada masyarakat sekitar, seperti kunyit putih dan lengkuas juga mempunyai banyak khasiat alami bagi tubuh, sayuran dan tanaman herbal yang direkomendasikan pada kegiatan ini mudah untuk dilakukan dengan memanfaatkan lahan sekitar rumah.

Penelitian yang selanjutnya yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Aslan di jurnal yang berjudul “Pemanfaatan Lahan Pekarangan Sebagai Pangan Lestari di Masa Covid-19”. Dalam jurnal tersebut membahas tentang masa pandemi ini masyarakat mengalami krisis pangan terutama tanaman pangan, Pemanfaatan tanah pekarangan ini dapat memiliki tiga manfaat sekaligus, yakni peningkatan nilai-nilai konservasi, nilai ekonomi, dan nilai ketahanan pangan. Menghadapi kondisi pandemi masyarakat harus mampu menyediakan pangan dan memproduksi sendiri (Thesiwati, 2020).

Pemanfaatan lahan pekarangan sebagai lahan pangan diharapkan dapat membantu masyarakat rumah tangga dalam memenuhi kecukupan bahan pangan dalam masa pandemi Covid-19. Ketahanan pangan merupakan masalah yang ditimbulkan dengan berkurangnya aktivitas pertanian maka masyarakat akan mengalami krisis pangan, pemanfaatan lahan pekarangan dengan menerapkan konsep pangan lestari dimulai dari hal terkecil pembentuk masyarakat yaitu keluarga. Sayur-sayuran, buah-buahan, obat-obatan dan tanaman hias merupakan

jenis tanaman yang biasa ada di pekarangan, yang keseluruhannya dapat menunjang kebutuhan sehari-hari.

Penelitian yang selanjutnya yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati di jurnal yang berjudul “Solusi Ketahanan Pangan Rumah Tangga Perkotaan Saat Pandemi Covid-19”. Dalam jurnal tersebut membahas tentang ketahanan pangan menjadi masalah yang sangat mendasar bagi pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu juga menjadi isu penting pada situasi bencana, termasuk bencana pandemi Covid-19 (Kurniawati et al., 2020).

Permasalahan mengenai ketahanan pangan tidak hanya terjadi di pedesaan, tetapi juga terjadi di perkotaan. Rumah tangga perkotaan juga mengalami permasalahan ketahanan pangan karena banyaknya penduduk yang melakukan urbanisasi dengan harapan dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan. Masyarakat kota dengan segala keterbatasan lahan dengan adanya pandemi ini harus bisa bertahan dan memastikan ketahanan pangan keluarganya. Pandemi covid-19 ini mengajarkan banyak pihak agar setiap rumah tangga mampu menjadi produsen penyedia bahan makanan bagi keluarganya.

Penelitian yang selanjutnya yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Setiawan di jurnal yang berjudul “Pengelolaan Pekarangan Melalui Hatinya PKK untuk Ketahanan Pangan dalam Menghadapi Pandemi Covid-19”. Dalam jurnal tersebut membahas mengenai menyiasati kondisi pandemi Covid-

19 dalam hal ketahanan pangan, salah satu alternatif solusinya adalah memanfaatkan halaman dan pekarangan rumah sebagai lahan budidaya tanaman melalui program Hatinya PKK (Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga), untuk mewujudkan program Hatinya PKK di Gondoarum, dilakukan pengabdian pada masyarakat dengan tujuan mengelola pekarangan rumah menjadi lahan pertanian produktif, serta meningkatkan pengetahuan, wawasan dan ketrampilan masyarakat Gondoarum dalam mengelola lahan pekarangan untuk budidaya tanaman (Setiawan & Wijayanti, 2020).

Penelitian yang selanjutnya yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Malonda di jurnal yang berjudul “Edukasi Mengenai Pentingnya Ketahanan Pangan Rumah Tangga dan Model Pemanfaatan Pekarangan pada Pengurus TP-PKK Desa Dame I”. Dalam jurnal tersebut membahas tentang Peningkatan pengetahuan demi mendukung perubahan perilaku dalam hal ini pemanfaatan pekarangan guna mendukung ketahanan pangan, ketahanan pangan rumah tangga sebagai salah satu penyebab kejadian gizi kronis, merupakan permasalahan yang telah lama dihadapi dan semakin berat dengan kondisi pandemi yang terjadi tahun 2020. Kondisi ini menjadi tantangan yang besar terhadap ketahanan pangan rumah tangga (Sanggalorang & Malonda, 2020).

Penelitian yang selanjutnya yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Munawar di jurnal yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat”.

Dalam jurnal tersebut membahas tentang pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) dan pembangunan masyarakat (*community development*) dimaksudkan sebagai pemberdayaan masyarakat yang sengaja dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya yang dimiliki sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial secara berkelanjutan.

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan hal banyak dibicarakan masyarakat karena terkait dengan kemajuan dan perubahan bangsa ini kedepan apalagi apabila dikaitkan dengan skill masyarakat yang masih kurang akan sangat menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Konsep pemberdayaan masyarakat yang dimaksud adalah tingkat kemajuan yang harus dicapai sehingga masyarakat dapat membangun dan memelihara kelangsungan hidupnya berdasarkan kekuatannya sendiri secara berkelanjutan, artinya untuk membangun bangsa yang mandiri dibutuhkan perekonomian yang mapan (Noor, 2011).

Penelitian yang selanjutnya yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahmawaty di jurnal yang berjudul “Sistem Pertanian Terpadu Di Lahan Pekarangan Mendukung Ketahanan Pangan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan”. Dalam jurnal tersebut membahas tentang keuntungan lain dari diterapkannya sistem pertanian terpadu adalah terpeliharanya keragaman

hayati, terutama keragaman vegetasi (tumbuhan dan tanaman). Lahan pekarangan yang selama ini selalu dimanfaatkan sebagai apotik hidup dengan menanam tanaman obat keluarga (TOGA) dan gizi hidup dengan menanam berbagai buah-buahan dan sayuran dapat dikembangkan ke dalam bentuk pertanian terpadu (Abdul Rauf, Rahmawaty, 2013).

Penelitian yang selanjutnya yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Shinta di jurnal yang berjudul “Implementasi Program *Urban Farming* Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Perkotaan (Studi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang)”. Dalam jurnal tersebut membahas tentang program *urban farming* merupakan implementasi kebijakan Pemerintah Indonesia yang mengangkat program yang berhubungan dengan pertanian di sektor kota yang melibatkan keahlian, inovasi dalam pengelolaan pangan bagi masyarakat kota dengan memanfaatkan lahan-lahan kosong di sekitar kota guna meningkatkan kesehatan, ekonomi, dan kualitas hidup keluarga serta memotivasi Keluarga agar lebih produktif dalam memanfaatkan lahan yang ada (Shinta Devy Setyaningrum, Nurul Umi Ati, 2021).

Berdasarkan kajian di atas, telah dijelaskan oleh beberapa peneliti terdahulu yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan dan pemberdayaan masyarakat. Maka untuk pembeda dalam penelitian kali ini yaitu adanya lokasi yang berbeda dari peneliti sebelumnya, semangat masyarakat dalam membangun solidaritas untuk

mencukupi kebutuhan pangan selama pandemic covid 19, selain itu masyarakat kota yang peduli pada lingkungan sekitar, dan dimana penelitian sebelumnya belum ada yang membahas tentang kemandirian pangan pada masa pandemic covid 19 melalui kelompok tani dengan program pemberdayaan dari Dinas Pertanian Kota Yogyakarta. Focus penelitian ini adalah pada “Gerakan Pemanfaatan Lahan Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Untuk Ketahanan Pangan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Yogyakarta”.

F. Kerangka Teoritik

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan pe- dengan mendapat sisipan –m- dan akhiran –an menjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan (Purwaningsih, 2008).

Kata “pemberdayaan” adalah terjemahan dari bahasa Inggris “*Empowerment*”, pemberdayaan berasal dari kata dasar “*power*” yang berarti kekuatan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan “em” pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas. (Purwaningsih, 2008)

Secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (Margolang, 2018):

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory, empowerment and sustainable* (Chamber, 1995). Chamber menjelaskan bahwa konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari alternative pertumbuhan ekonomi lokal (Purwaningsih, 2008).

Menurut Shardlow dalam Isbandi Rukminto Adi pengertian yang ada mengenai pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Hal tersebut dapat terwujud apabila masyarakat atau individu-individu dapat mengakses sumber-sumber yang membuat mereka lebih berdaya. Ketidakmampuan individu atau masyarakat memperoleh akses menuju ke sumber yang membuat mereka lebih berdaya disebabkan oleh berbagai macam keadaan yang ada pada lingkungan masyarakat (Purwaningsih, 2008).

Berdasarkan definisi pemberdayaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial seperti: kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

2. *Civil society*

Definisi tentang *civil society* telah banyak dijelaskan oleh para peneliti. Salah satunya merupakan konsep tentang *civil society* yang digagas oleh Alexis

de Tocqueville. Konsep ini juga banyak sekali digunakan di Indonesia setelah berakhirnya orde baru dan dimulainya era reformasi. Menurut Tocqueville *civil society* adalah ruang lingkup kehidupan social yang terorganisir serta memiliki karakteristik kesukarelaan, keswasembadaan, keswadayaan (Syahputra, 2014;5). Selanjutnya Tocquville menjelaskan bahwa *civil society* dengan dimensi kulturalnya dapat memiliki peran sebagai kekuatan penyeimbang di sebuah wilayah atau negara. Peran ini dijalankan dengan adanya keterikatan terhadap norma-norma dan nilai hokum yang diikuti warganya.

Penjelasan lain tentang *civil society* disampaikan oleh Habermas dan Cardoso dalam Hikam (1999: 200) yang mengatakan bahwa *civil society* adalah kelompok yang terdiri dari keluarga, masyarakat sukarela, hingga organisasi yang menjadi perantara antara negara dengan masyarakat. *Civil society* juga merupakan sebuah ruang politik yang menjaga berlangsungnya perilaku, tindakan, refleksi mandiri, serta tidak tergabung dalam kelembagaan politik resmi. Selain itu, menurut Rosyada (2003: 240) *civil society* merupakan system social yang memiliki prinsip menjamin terjadinya keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat.

Schmitter berpendapat bahwa masyarakat sipil punya sumbangan paling positif pada konsolidasi demokrasi, bukan dalam sistem-sistem yang pluralis (dimana luasnya keragaman dari organisasi-organisasi yang sempit dan tumpang

tindih muncul dengan ketergantungan di antara para anggota atau mitra dialog mereka) tetapi dalam sistem korporatis di mana perkumpulan-perkumpulan kepentingan dengan lingkup dan ruang kepentingan yang khusus terfokus secara nasional dan terkoordinasi secara hirarkis menjadi perkumpulan tunggal, dengan kemampuan (Efendi, 2018).

Menurut Larry *civil society* bukanlah omong kosong biasa yang berarti sama dengan “masyarakat” atau dengan segala sesuatu yang bukan negara atau bukan system politik formal. Salah satu konseptualisasi yang paling menyesatkan dan bahkan mengandalkan tentang masyarakat sipil adalah “memperlakukannya sekedar sebagai organisasi yang independen dari negara”. Selain otonom, suka rela, dan patuh pada hukum, organisasi-organisasi masyarakat sipil berbeda dari kelompok-kelompok lain di masyarakat dalam lima hal ini(Diamond, 2003):

1. Masyarakat sipil memusatkan perhatiannya pada tujuan-tujuan public bukan untuk privat.
2. Masyarakat sipil dalam beberapa hal berhubungan dengan negara tetapi tidak berusaha merebut kekuasaan atas negara atau mendapatkan posisi dalam negara.
3. Masyarakat sipil mencakup pluralisme dan keragaman.

4. Masyarakat sipil tidak berusaha menunjukkan kepentingan pribadi atau komunitas.
5. Masyarakat sipil harus di bedakan dari fenomena *civiv community* yang lebih jelas meningkat demokrasi.

Civil society juga dapat diartikan sebagai kelompok social yang terdiri dari lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, media, kelompok profesi, organisasi keagamaan, dan lain-lain yang memiliki fungsi menjadi kekuatan penyeimbang dari pemerintah maupun sector swasta (Diamond, 2003)

Sebagai salah satu respon kelompok masyarakat terhadap berbagai permasalahan yang ada terutama permasalahan lingkungan adalah dengan munculnya gerakan ekologi (*environmental movement*). Menurut Khitam (2014:213) gerakan lingkungan dalam pengertiannya adalah suatu gerakan yang mengandung jejaring yang luas antar individu dan organisasi-organisasi yang saling mengikat diri dalam aksi bersama (*collective action*) mengatasi permasalahan lingkungan. Gerakan lingkungan yang berusaha menyelesaikan degradasi lingkungan (*public interest*) (Yuanjaya, 2015:58), pemerintah melalui instansi terkait hanya mendampingi atau sebagai katalisator (Osborne dan Gaebler, 2015:29).

Civil society merupakan suatu kelompok individu yang berada di organisasi untuk mencapai tujuan tertentu jumlahnya terdiri dari tiga atau empat bahkan

sampai ribuan orang, yang memiliki tujuan umum dan tujuan yang spesifik, untuk mencapai tujuan tersebut. *Civil society* juga merupakan bagian dari ideologi dengan politik atau cara tertentu tidak dilakukan secara individu tanpa kepemimpinan (Bungin, 2006).

Berdasarkan penjelasan dari beberapa teori di atas tentang *civil society*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *civil society* merupakan sekumpulan masyarakat yang melaksanakan aktifitas dengan tujuan untuk kepentingan rakyat serta menjadi kekuatan penyeimbang dari sebuah negara.

Pada struktur dan organisasi dalam masyarakat politik dan negara, pada masyarakat sipil juga dapat mengukur kelembagaan para aktor masyarakat sipil dengan empat kriteria menurut Samuen Huntington: otonomi, kemampuan adaptasi, koherensi, kompleksitas. Otonomi harus memisahkan seorang actor masyarakat sipil dari dominasi atau control, bukan saja oleh negara tetapi juga oleh seorang pemimpin individual, pendiri, atau klik penguasa (Diamond, 2003).

Ciri utama yang dimiliki oleh *civil society* adalah keswadayaan dan kesukarelaan (Maksun, 2015; 70). *Civil society* mengupayakan kepentingan bersama dengan tujuan keswasembadaan agar mampu melaksanakan segala aktivitas tanpa adanya ketergantungan. *Civil society* fokus kepada interaksi terbuka dengan melakukan dialog dan mencari jalan tengah dari permasalahan yang ada, sehingga kepentingan bersama dapat tercapai.

Menurut Soim dalam Sanjaya (2017; 19) ada beberapa syarat agar *civil society* dapat terbentuk dengan tujuan untuk pengembangan masyarakat sebagai berikut:

1. Kebutuhan dasar individu, keluarga dan kelompok dapat terpenuhi di dalam masyarakat.
2. Terjalinnnya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok karena modal manusia dan modal social berkembang
3. Di hilangkannya dikriminasi terhadap pelayananan social
4. Dimilikinya kemampuan untuk terlibat dalam berbagai forum dengan tujuan mengembangkan kepentingan bersama dan kebijakan publik.
5. Adanya sikap saling menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan.
6. Terwujudya produktivitas dan keadilan social bagi lembaga social, hokum, ekonomi.
7. Terjadinya hubungan dan komunikasi antar jaringan-jaringan masyarakat secara teratur, terbuka, dan terpercaya.

Adapun penjelasan lain tentang *civil society* bahwa *civil society* dalam sebuah kelompok di masyarakat memiliki beberapa unsur pokok yaitu (Suharno, 2007):

1. *Free Public Sphere*

Pada unsur pertama yaitu wilayah publik yang bebas, ruang publik ini diharapkan mampu memberikan ruang pada setiap warga negara untuk dapat memiliki posisi dan hak serta kebebasan yang sama dalam mengemukakan pendapat untuk melakukan transaksi sosial dan politik tanpa rasa takut dan terancam oleh kekuatan di luar *civil society*.

Sebagai sebuah prasyarat, maka untuk mengembangkan dan mewujudkan masyarakat madani dalam sebuah tatanan masyarakat, maka *free public sphere* menjadi salah satu bagian yang harus diperhatikan. Karena dengan menafikan adanya ruang public yang bebas dalam tatanan masyarakat madani, maka akan memungkinkan terjadinya pembungkaman kebebasan warga Negara dalam menyalurkan aspirasinya yang berkenaan dengan kepentingan umum oleh penguasa yang tiranik dan otoriter.

2. Demokratis

Demokrasi adalah prasyarat mutlak lainnya bagi keberadaan *civil society* yang murni. Tanpa demokrasi, *civil society* tidak mungkin terwujud. Demokratis merupakan satu entitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani dalam menjalani kehidupan, warga negara

memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya.

Demokratis berarti masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan suku, ras dan agama. Prasyarat demokratis ini banyak dikemukakan oleh para pakar yang mengkaji fenomena masyarakat madani. Bahkan demokrasi merupakan salah satu syarat mutlak bagi penegakan masyarakat madani. Penekanan demokrasi di sini dapat mencakup sebagai bentuk aspek kehidupan seperti politik, social, budaya, pendidikan, ekonomi dan sebagainya.

3. Toleran

Toleran merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Toleransi ini memungkinkan akan adanya kesadaran masing-masing individu untuk menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain yang berbeda.

4. Kemajemukan

Sebagai sebuah prasyarat penegakan masyarakat madani, maka pluralisme harus dipahami secara mengakar dengan menciptakan sebuah

tatanan kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pluralisme tidak bisa dipahami hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan pluralisme itu sebagai bernilai positif, merupakan rahmat Tuhan.

5. Keadilan Sosial

Pada bagian akhir dari unsur pokok *civil society* adalah adanya suatu keadilan sosial bagi seluruh warga negara, di mana terdapat suatu keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik kehidupan ekonomi, politik, pengetahuan, dan kesempatan. Dengan ini bisa dikatakan bahwa *civil society* merupakan keadaan di mana hilangnya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan yang dilakukan oleh sekelompok atau golongan tertentu.

Keadilan dimaksudkan untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga Negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Hal ini memungkinkan tidak adanya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan pada satu kelompok masyarakat. Secara esensial, masyarakat memiliki hak

yang sama dalam memperoleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

3. Ketahanan Pangan

Menurut Pribadi ketahanan pangan adalah suatu kondisi dimana seluruh penduduk di suatu daerah atau negara tertentu memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap bahan pangan untuk memperoleh gizi yang cukup dalam rangka hidup secara sehat dan produktif. Ketahanan pangan juga merupakan suatu keadaan terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau (Jhamtani, 2008).

Ketahanan pangan menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, yaitu terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Dalam kaitan ini, penjelasan mengenai Undang-undang tersebut secara tegas menekankan bahwa “Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia harus senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat”. Tujuan akhir

ketahanan pangan adalah terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga sehingga setiap individu akan mampu hidup secara aktif dan sehat.

Menurut Badan Ketahanan Pangan (BKP) ketahanan pangan memiliki suatu system yang terdiri dari 3 subsistem yaitu: ketersediaan, distribusi, dan konsumsi memiliki fungsi masing-masing (Gardjito & Salfarino, 2011).

A. Subsistem Ketersediaan

Subsistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan yang memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman, dan keamanannya.

B. Subsistem Distribusi

Subsistem distribusi adalah mewujudkan distribusi pangan yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu, dengan harga yang stabil dan terjangkau.

C. Subsistem Konsumsi

Subsistem konsumsi memiliki fungsi mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalan, selain itu juga dapat mencegah pemborsan.

Dari konsep tersebut diatas, suatu negara bisa saja mencapai tingkat ketahanan pangan yang baik diukur dari tingkat ketersediaan pangan di tingkat

rumah tangga, walaupun kebutuhan pangan tersebut dipenuhi dengan cara membeli produk impor, jelas terlihat bagi negara, kecukupan pangan menjamin bahwa setiap individu akan mampu hidup sehat dan aktif saja tidak cukup, karena itu muncul konsep kemandirian pangan yang memberikan penekanan pada pentingnya melepaskan diri pada produk impor. Konsep kemandirian pangan menitikberatkan pada pentingnya pemenuhan pangan yang berbasis pada sumber daya lokal (Fitrian, 2020).

Ketahanan pangan merupakan salah satu unsur penting kekuatan negara, apabila suatu negara memiliki ketahanan pangan bagi seluruh rakyatnya, maka negara itu termasuk negara yang kuat. Tapi tentu saja ketahanan pangan ini sendiri memiliki faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu (Oelviani et al., 2020) :

1. Lahan

Lahan merupakan unsur penting dalam hal mencapai ketahanan pangan. Ketahanan pangan keluarga dapat tercapai apabila luas lahan tanam dari lahan pekarangan tersebut sebanding dengan jumlah kebutuhan pangan dari keluarga yang ber tempat tinggal di daerah tersebut.

2. Lingkungan Fisik atau Iklim

Pertanian pangan sangat rentan pada perubahan iklim, khususnya pada iklim kering berkepanjangan atau kemarau. Permasalahan iklim memang sudah harus dipikirkan oleh warga sebelum merealisasikan sebuah program peningkatan produktivitas pertanian dalam upayanya mencapai ketahanan pangan.

3. Dana

Ketersediaan dana sangat mempengaruhi produktivitas pertanian di suatu kelompok petani di wilayah perkotaan. Keterbatasan dana menyebabkan melemahnya ketahanan pangan, apabila dana pengembangan pertanian dapat memenuhi segala kebutuhan produksi pertanian khususnya tanaman pangan, maka rantai distribusi akan pendek yang berarti harga akan lebih murah dan penghasilan petani juga akan meningkat.

4. Relasi Kerja

Pola relasi kerja yang terdapat di sektor pertanian akan sangat menentukan apakah petani akan menikmati atau tidak hasil pertaniannya. Relasi kerja di perkotaan akan menentukan pendapatan ekonomi di wilayah tersebut.

5. Ketersediaan Input Lainnya

Ketersediaan pupuk murah atau bersubsidi merupakan salah satu kunci upaya meningkatkan pertumbuhan pertanian. Ketahanan pangan tidak akan terganggu apabila ketersediaan sarana pertanian, termasuk pupuk dengan kualitas baik dan relatif murah mudah diraih oleh petani. Ketahanan pangan merupakan hal yang terintegrasi dari tiga unsur, yaitu ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan.

G. Definisi Konseptual

1. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam mengontrol dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.
2. *Civil society* adalah sekumpulan masyarakat yang melaksanakan aktivitasnya dengan tujuan untuk kepentingan rakyat serta menjadi kekuatan penyeimbang dari sebuah Negara. Bahwasannya *civil society* merupakan sebuah system dari kegiatan kerja sama yang mempunyai ciri yaitu memiliki kerja sama yang berdasarkan pada hak kewajiban dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama.
3. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman merata dan terjangkau untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

H. Definisi Operasional

Tabel 1. 2
Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator
1	Pemberdayaan	<ol style="list-style-type: none">1. Menciptakan dan mengembangkan potensi dalam kelompok.2. Memiliki kemampuan dalam mencukupi kebutuhan kelompok.3. Menciptakan perubahan kesejahteraan dalam kelompok.
2	<i>Civil society</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Egaliter antar anggota kelompok.2. Adanya otonomi warga menentukan program
3	Ketahanan pangan	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan ekonomi produktif berbasis komunitas.2. Dapat memenuhi kebutuhan pangan komunitas.3. Jenis tanaman pangan yang dikelola.

Sumber: Diolah Penulis (2021)

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ada sejumlah pengertian tentang metode penelitian kualitatif yang ditemukan oleh para ahli. Menurut Denzin & Lincoln penelitian kualitatif merupakan sebuah upaya untuk melakukan rasionalisasi dan interpretasi atau penafsiran terhadap kehidupan realita berdasarkan apa yang dipahami oleh peneliti. Maka dari itu, penelitian kualitatif pada umumnya melibatkan sejumlah bukti empiris atau data lapangan yang menggambarkan kejadian alamiah dan problematis serta makna dari kehidupan setiap individu manusia tersebut (Al-Hamdi et al., 2020).

Arti dari kata kualitatif sendiri yaitu turunan dari kata kualitas. Kata kualitas tentu memiliki makna yang bertentangan dengan istilah kuantitas, kuantitas diartikan sebagai jumlah atau angka-angka sedangkan kualitas lebih cenderung dimaknai sebagai *high degree* atau derajat yang lebih tinggi. Dengan pengertian tersebut makna kualitas memiliki hubungan dengan sifat-sifat esensial suatu benda, objek, objek, dan fenomena tertentu (Helaluddin & Wijaya, 2019).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, menurut Wijaya (2019), Metode penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai mendeskripsikan atau menggambarkan segala sesuatu yang ditemuinya secara lengkap, rinci, dan mendalam. Oleh karena itu yang diteliti merupakan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh para pelaku, proses yang sedang berlangsung dan berbagai aktivitas lain dalam konteks ilmiah.

Maka dari itu, peneliti wajib melakukan membuat catatan lapangan dan catatan wawancara yang rinci, lengkap, dan apa adanya. Maksud dari apa adanya ialah tidak ada penilaian dari peneliti (peneliti tidak ikut campur dalam menafsirkannya). Peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan hasil wawancara, bukan menjelaskan atau eksplanasi dan juga bukan membuat evaluasi atau penelitian.

Kegiatan pemanfaatan lahan kosong merupakan salah satu strategi dalam menjaga lingkungan pada masa pandemi Covid-19 agar dapat menjadi lebih

mudah karena dalam proses penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan dan metode tersebut dapat mengembangkan secara luas penelitian tersebut agar semua orang mendapatkan informasi terkait kegiatan tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Dalam pengembangan penelitian terkait Gerakan Pemanfaatan Lahan Sebagai Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Ketahanan Pangan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Yogyakarta. Saya mengambil lokasi yakni di tiga wilayah:

- a. Kampung Pugeran (Ngudimulyo), RT 06/RW 02, Kelurahan Suyodiningratan, Kecamatan Mantrijeron Yogyakarta.
- b. Kampung Blunyahrejo (Markisa), RT 16/RW 05, Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalorejo Yogyakarta.
- c. Kampung Purbayan (Purbaasri), RT 57/RW 14, Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kotagede Yogyakarta.

Peneliti memilih ketiga lokasi tersebut untuk dijadikan penelitian, karena adanya solidaritas dan inisiatif warga yang berupaya untuk mencukupi kebutuhan pangan selama pandemic dengan mendirikan gerakan pemanfaatan lahan dan membuat kelompok tani dari setiap wilayah. Selain itu, ketertarikan peneliti dalam memilih ketiga lokasi di atas yaitu latar belakang dari terciptanya ketiga kelompok

tani dan kesadaran masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitar dan melakukan perubahan lahan sehingga lahan yang awalnya tidak terawat namun sekarang menjadi lahan pertanian produktif yang mampu mencukupi kebutuhan pangan dari hasil lahan tersebut selama pandemic covid 19, namun semua hal itu juga merupakan dukungan dari pemerintah.

3. Jenis Data

Berdasarkan sumbernya, jenis data yang nantinya akan dikumpulkan dapat dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung terkait penelitian Gerakan Pemanfaatan Lahan Sebagai Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Ketahanan Pangan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung penelitian atau pelengkap dari data primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung serta dapat dihasilkan oleh media, dokumen atau informasi lainnya yang dapat mendukung pengembangan penelitian terkait pemanfaatan lahan kosong sebagai kegiatan untuk menjaga ketahanan pangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan teknik sampling yaitu *purposive sampling*. Seperti yang sudah di jelaskan bahwa *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, semisal orang atau narasumber tersebut dianggap yang paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi yang akan di teliti(Sugiono, 2012).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi menggunakan teknik ini yakni:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan mengamati suatu fenomena secara langsung sehingga dapat mengamati gejala-gejala secara lebih efektif menggunakan seluruh alat indra. Menurut Suharsimi (2010 : 199) observasi sebagai suatu aktivitas sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata. Menggunakan metode observasi dapat lebih lengkap karena penelitian tersebut memudahkan dan memperlancar penelitian Gerakan Pemanfaatan Lahan Sebagai Program Pemberdayaan

Masyarakat Untuk Ketahanan Pangan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Yogyakarta.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan interview dengan tujuan mendapatkan informasi yang lebih jelas. Teknik wawancara yang akan digunakan adalah wawancara terstruktur, karena dengan menggunakan teknik terstruktur akan mudah mendapatkan data-data yang dianggap relevan dengan penelitian. Menurut S. Nasution (2011:113) wawancara adalah “suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi”.

Tabel 1. 3
Jadwal Wawancara

No	Nama	Posisi	Tanggal	Lokasi Wawancara
1.	Bapak Muhammad Fathoni	Ketua Kelompok Tani Ngudimulyo	Tanggal 23 juni 2021	Kebuntani pugeran
2.	Bapak Rihadianto	Koordinator Kampung Markisa	Tanggal 23 juni 2021	Kebuntani blunyahrejo
3.	Bapak Widodo	Wakil Kelompok Tani	Tanggal 29 Juni 2021	Kebuntani purbayan

		Purbaasri		
4.	Mas Anang Saptoto	Pendiri Komunitas Panen Apa Hari Ini	Tanggal 26 Agustus 2021	Studio Komunitas Panen Apa Hari Ini
5	Bapak Supriyanto	Kepala Seksi Ketahanan Pangan	Tanggal 22 Oktober 2021	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Yogyakarta
6	Bu Iswati	Bendahara Kelompok Tani Ngudimulyo	Tanggal 23 Oktober 2021	Kebuntani Pugeran

Peneliti memilih beberapa narasumber di atas karena, mereka semua di pilih oleh peneliti karena sesuai dengan teknik pengambilan sample pada penelitian ini yaitu *purposive sampling*. Hal itu di sebabkan karena adanya pertimbangan tertentu dalam mengambil data dan narasumber tersebut dianggap yang paling tahu tentang apa yang peneliti butuhkan dalam penelitian kali ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dokumen adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di *server* dan *flashdisk*, data tersimpan di *website*, dan lain-lain. Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan data dokumenter yang tersimpan di websites, salah satunya seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kota Yogyakarta Dalam Angka

5. Teknik Analisis Data

Menurut Rijali pengumpulan data dan analisis data bersifat interaktif. Hal tersebut memiliki definisi yaitu, pengumpulan data merupakan bagian yang tidak bisa di pisahkan dari kegiatan analisa. Proses dalam penelitian kualitatif tidak hanya sekali saja tetapi ini merupakan proses interaksi bolak balik yang sebagian besar bergantung pada kerumitan masalah yang akan dipecahkan dan

kepekaan peneliti untuk membuat perbandingan dalam pengumpulan data (Al-Hamdi et al., 2020).

Menurut David dalam bukunya menjelaskan adanya tahap-tahap analisis data, secara umum kegiatan analisis data meliputi rangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data dan pengelolaan data

Tahap pertama dalam analisis data setelah selesai pengumpulan data, baik dari studi dokumentasi, wawancara, observasi maupun fgd, adalah mengolah data tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pada tahap ini, peneliti juga melibatkan proses penyalinan dari rekaman suara wawancara menjadi teks atau biasa disebut dengan transkrip.

2. Seleksi data

Seleksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang berguna dan relevan untuk di pakai dalam proses analisis, apakah data itu berupa data deskripsi maupun data table dan gambar, dan menyisihkan data-data yang di anggap kurang relevan dengan topic penelitian.

3. Analisis antar variable dan verifikasi data

Langkah berikutnya adalah usaha untuk mengkaitkan temuan satu variable atau indikator dengan variabel atau indikator lainnya. Sebagai simulasi, jika pada indicator efisiensi berhasil sedangkan pada indicator

kecukupan gagal, apa yang sebenarnya terjadi padahal seharusnya kedua indikator tersebut saling terkait. Artinya, jika efisiensi dianggap berhasil, seharusnya kecukupan juga dianggap berhasil. Jika temuannya kontra, peneliti dituntut untuk menjelaskan ketidak sinkronan tersebut.

4. Penafsiran dan penarikan kesimpulan

Penafsiran merupakan usaha untuk menjawab rumusan masalah yang telah di ajukan di awal berdasarkan analisis antar variabel dan verifikasi data. Hasil penafsiran inilah yang kemudian menjadi dasar pijakan untuk ditarik kesimpulan yang menjadi bab akhir dari rangkaian penelitian keseluruhan.